

artikel_majalah_JIANA.pdf

by

Submission date: 27-May-2020 11:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 1332601211

File name: artikel_majalah_JIANA.pdf (300.05K)

Word count: 4734

Character count: 30476

**ANALISIS PERBEDAAN ²⁷
KEBIJAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO DAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

STEELYANA INDRIASARI ^{dan} WINARTI

ABSTRACT

To achieve a good governance and institutional reforms needed the public management reform. However, these changes should be strike to the principles of good financial management. The main purpose of this study is analyze differences of local financial governance policy between Sukoharjo and Karanganyar District.

This study used survey method by using questioners for collecting data. The populations of this study are Officers of the Regional Secretariat, Department / Agency / Office / financial management unit (PPKD, SKPD) with echelon III criteria, the DPRD Budget Board and relevant stakeholders. Sampling technique using saturated sampling. The data were tested validity and reliability by used formula product moment correlation and Cronbach's alpha. The analysis technique used is different test technique on the average of two independent sample t-test.

The results showed that based on research, that the different test used Independent Sample Test (Mann Whitney Test) and Independent Sample t-Test, showed that there were differences in the application of the principles of financial management in local financial governance policy between Sukoharjo and Karanganyar District. Sukoharjo District is better than Karanganyar District in applying the principles of financial management for local financial governance.

Keywords: policy, local financial governance, district

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah pada pos pendapatan adalah relevan dan peran pendapatan asli daerah yang khusus merupakan kewenangan pemerintah daerah seharusnya menjadi sumber keuangan terbesar daerah guna meningkatkan kemandirian daerah (Halim A. 2001:20).

Di era otonomi daerah saat ini ¹⁸ Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan daerah utama. ¹ Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan ¹ sumber pendapatan lain dinilai terlalu berfluktuatif dan diluar kewenangan pemerintah, dan selain itu faktor pendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi.

³ Kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Wahyudi, tujuan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi fiskal dibidang pengelolaan keuangan dapat dikatakan belum berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya didalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, namun harus diakui bahwa keberhasilan dari segi politik dapat dicapai dan sangat bermanfaat guna menjaga kestabilan dan keutuhan NKRI. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya pelaksanaan manajemen keuangan daerah yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:145).

Reformasi manajemen publik terkait dengan penggunaan model pemerintah baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, bukan hanya sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Perubahan tersebut ⁶ harus tetap berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi : Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), Transparansi, Pengendalian (Masdiasmo, 2002,29).

Pada kenyataannya Kajian yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar yang belum mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari angka-angka pembangunan yang tertuang pada kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar dalam angka. Kebijakan tata kelola keuangan daerah kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebijakan tata kelola keuangan daerah yang ideal (Solopos, 12 Agustus 2010).

Transparency international Indonesia telah menunjukkan perannya dalam program pemberantasan korupsi dan sangat berguna dalam mengontrol terhadap pemerintah guna memperbaiki sistem tata kelola keuangan negara maupun daerah khususnya dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan ⁴ laporan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) kabupaten Sukoharjo, Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan BPS tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 4,76 %,

sedangkan Kabupaten Karanganyar hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 %, di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,71 % dan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,5 persen.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia tentang Kajian Ekonomi Regional di eks Karisidenan Surakarta pada tahun 2009, kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 356,75 miliar rupiah atau 51,42 % dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 14,15 %, dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dana perimbangan masih memberikan kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,73 %, dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 91,84 % dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 323,75 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 14,51 persen. PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing realisasi sebesar 21,98 miliar rupiah dan 11,11 miliar rupiah. Realisasi PAD mengalami penurunan 0,74 % sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami peningkatan 43,54 % dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

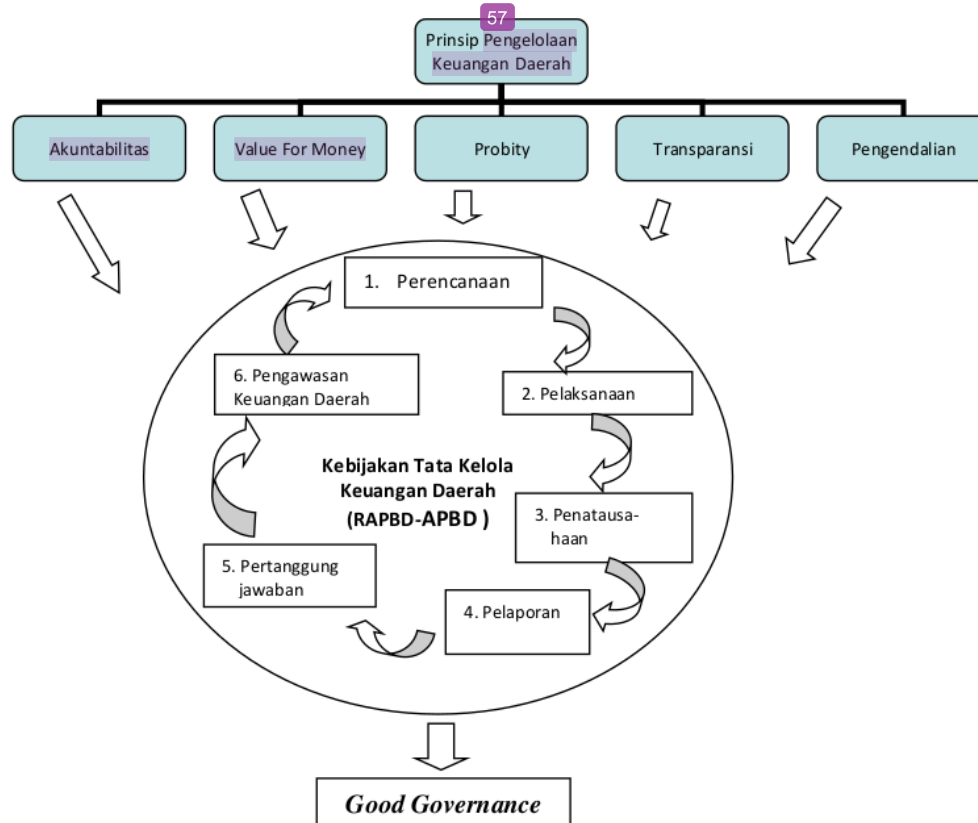
Kabupaten Karanganyar, tahun 2009 berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 369,25 miliar rupiah (51,34 %) dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 5,25 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dana perimbangan masih member kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,26 % dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 90,61 % dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 333,27 miliar rupiah (mengalami peningkatan 18,98%. Untuk PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan 33,27 % dan 69,89 % dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kabupaten Sukoharjo, telah merealisasi belanja sebesar 300,99 miliar rupiah (mencapai 40,67 %) dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari belanja tidak langsung 245,32 miliar rupiah dan belanja langsung 55,68 miliar rupiah yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,87 % dan 11,08 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam belanja tidak langsung terdapat peningkatan Belanja Pegawai 51,84 % atau terealisasi sebesar 233,10 miliar rupiah sebesar 30,65 miliar rupiah, mengalami penurunan 4,19 % sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah 92,11 %

sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 15.66 miliar rupiah, mengalami penurunan 4,19 % sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah meningkat 92,11 %.

Kabupaten Karanganyar telah merealisasi belanja sebesar 299,27 miliar rupiah atau mencapai 37,42 % dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari belanja tidak langsung 275,51 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,88 % dan belanja langsung 27,88 miliar rupiah atau sebesar 15,10 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam belanja tidak langsung terdapat peningkatan Belanja Pegawai 12,36 % atau realisasi sebesar 247,26 miliar rupiah. Sedangkan pada pos Belanja Langsung pada komponen barang dan jasa terealisasi sebesar 18,44 miliar rupiah, mengalami peningkatan 1,29 % sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 5,32 miliar rupiah menurun 22,97 %. Permasalahannya adalah “Apakah ada perbedaan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar ?”

³ Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Dan kajian teoritis dapat dijelaskan dengan Alur pikir penelitian dimaksudkan adalah sbb :



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah uji komparatif yaitu menghitung perbedaan mean dari dua sampel independen (Pengujian-t). Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, lokasi ini dipilih berdasarkan justifikasi peneliti dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memberikan data yang sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil penelitian tidak secara otomatis dapat digunakan sebagai referensi daerah lain yang lebih luas.

Populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Sekretariat daerah, Kepala dinas / Badan / Kantor tingkat kabupaten sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kriteria pejabat eselon III, anggota DPRD dengan kriteria anggota Badan Anggaran

Dewan, dan *Stakeholders* terkait (LSM), penentuan dengan menggunakan metode *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengolahan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah untuk mendapatkan skor total dari responden untuk pertanyaan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah sebagai variabel independen. Tahap kedua adalah melakukan uji beda dengan teknik uji beda rata-rata dua sampel independen (*t-test*) untuk membandingkan perbedaan antara dua kelompok sampel. Dalam penelitian ini uji beda statistik yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows 13.0*.

Untuk menguji hipotesa H_1 : Ada perbedaan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Dipakai rumus uji beda rata-rata (*t-test*) secara umum adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 (1/n_1 + 1/n_2)}}$$

Dengan

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1) S_1^2 + (n_2-1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Uji beda yang dilakukan dengan menggunakan uji *Independent Sample Test (Mann Whitney Test)* dan uji *Independent Sample t-Test*.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari 261 kuesioner yang dikirim kepada seluruh pejabat eselon III di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, anggota DPRD bidang anggaran dan *Stakeholder* terkait, ternyata hanya 136 kuesioner yang kembali kepada peneliti pada tenggat waktu yang telah ditetapkan.

a. Validitas

Instrument atau item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian dianggap valid apabila nilai signifikansi (2-tailed) $< (\alpha) 5\%$ atau 0,05.

Dari hasil pengujian validitas terhadap 5 variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi variabel Akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian diketahui bahwa semua item pertanyaan dari kelima variabel yang digunakan dalam kuisioner adalah valid kecuali item pertanyaan akuntabilitas 1 yang memiliki nilai signifikansi pada nilai korelasi per item dengan total korelasi sebesar 0,657 yang berarti nilai signifikasinya adalah $> (\alpha) 0,05$. Hal ini berarti bahwa pada item pertanyaan tersebut tidak valid sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian karena item pertanyaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang seharusnya bisa diukur oleh item pertanyaan tersebut mengenai kewajaran dalam laporan keuangan.

Demi menjamin keaslian data yang telah diperoleh, maka item pertanyaan akuntabilitas 1 harus di *out layer* atau di drop, sehingga item-item pertanyaan yang lain, yang terdapat dalam kuisioner tersebut dapat digunakan kembali untuk penelitian sejenis selanjutnya.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur apakah instrument kuisioner yang digunakan untuk pengumpulan data yang merupakan indikator-indikator dari variabel akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian telah handal atau reliable.

Pada penelitian ini hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha*. Indikator-indikator variabel tersebut dijabarkan dalam setiap item pertanyaan dalam kuisioner yang akan digunakan dalam penelitian. Indikator tersebut dianggap reliable apabila nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

Berdasarkan hasil penghitungan, maka nilai *cronbach alpha* dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,769	Reliabel
Value For Money	0,619	Reliabel
Probity	0,766	Reliabel
Transparansi	0,755	Reliabel
Pengendalian	0,827	Reliabel

Sumber : Data olahan SPSS

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari variabel akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian dalam

penelitian ini adalah handal atau reliable karena memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60 sehingga indikator-indikator dalam variabel ini dapat dipergunakan lagi sebagai dasar untuk penelitian sejenis berikutnya.

c. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas, diuji dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Cara menguji normalitas yaitu dengan membandingkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh dengan taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > α maka data terdistribusi normal atau sebaliknya jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* < α maka data tidak terdistribusi dengan normal (Singgih, 2000 : 179).

Berdasarkan hasil penghitungan, maka nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Nilai <i>Asymp Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,000	Tidak Normal
Value For Money	0,211	Normal
Probity	0,009	Tidak Normal
Transparansi	0,245	Normal
Pengendalian	0,027	Tidak Normal

Sumber : Data olahan SPSS

Dari hasil pengujian normalitas tersebut terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari variabel akuntabilitas, probity, dan pengendalian adalah < (α) 5% atau 0,05 artinya bahwa data dari ketiga variabel tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Sedangkan pada variabel *value for money*, dan transparansi nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah > (α) 5% atau 0,05 artinya bahwa data dari kedua variabel tersebut terdistribusi dengan normal. Sehingga dari hasil pengujian tersebut, maka pengujian selanjutnya (uji beda) untuk ketiga variabel yang tidak normal, yaitu variabel akuntabilitas, probity, dan pengendalian menggunakan uji *Independent Sample Test (Mann Whitney Test)*. Sedangkan untuk dua variabel yang terdistribusi normal yaitu variabel *value for money* dan transparansi menggunakan uji *Independent Sample t – Test*.

Independent sampel t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok (Trihendradi, 2004 : 99). Uji *Independent sampel t-test* merupakan uji

statistik parametrik yang dilakukan pada sampel yang terdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal pengujian dilakukan dengan uji *independent sampel test* (*Mann Whitney Test*) yang merupakan uji statistik nonparametrik, dimana persyaratannya lebih longgar yaitu tidak berdasar distribusi sampel sehingga uji ini juga sering disebut uji bebas distribusi (Trihendradi, 2004 : 136).

1. *Independent Sampel t-Test*

Hasil uji beda dengan menggunakan uji *independent sampel t-test* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Hasil Pengujian Independen Sampel t-test (2 Variabel)

Variabel	Mean		Levene's Test		t-test	
	Kab. Sukoharjo	Kab Karanganyar	F hitung	Sign	t hitung	Sign
Value For Money	34,3889	32,0938	2,234	0,137	4,587	0,000
Transparansi	24,3333	22,5781	0,179	0,673	2,685	0,008

Sumber : Data olahan SPSS

a. Value For Money

Berdasarkan hasil pengujian *independent sample t – test* diketahui bahwa pada variabel *value for money* di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar memiliki nilai signifikan pada f hitung di *Levene's test for equality of variance* sebesar 0,137 yang berarti bahwa nilai signifikannya adalah $> (\alpha) 5\%$ atau 0,05, artinya bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki variance pertanyaan dan jawaban yang sama.

Pada uji beda rata-rata variabel *value for money* antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, nilai *Sig (2-tailed)* pada nilai *t – test for equality of means* pada variabel *value for money* menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikannya adalah $< (\alpha) 5\%$ atau 0,05 artinya terdapat perbedaan di dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar khususnya untuk variabel *value for money*.

Pada variabel *value for money*, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 34,3889 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 32,0938. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dalam

berbagai unsur penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar.

Hal ini terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2009, di Kabupaten Sukoharjo angka pertumbuhan ekonomi daerah bisa mencapai angka 4,76 persen sedangkan di Kabupaten Karanganyar hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 persen dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 4,71 persen dan pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu sebesar 5,5 persen.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2009 atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 8.920.761,89 juta rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan 4.756.902,50 juta rupiah.

Sedangkan di Kabupaten Karanganyar, produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2009 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 8.378.315,88 juta rupiah, naik dua kali lipat bila dibandingkan pada PDRB tahun 2006 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 6.224.781,84 juta rupiah dan *income* per kapita 6.484.767,75 juta rupiah. Dan PDRB atas dasar harga konstan 4.401.301,74 juta rupiah dan *income* per kapita 4.561.426,52 juta rupiah.

Besar kecilnya pendapatan daerah mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Semakin besar pendapatan asli daerah suatu daerah bisa berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan otonomi daerah.

PAD di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2009 sebesar 48.842.528 ribu rupiah. Sedangkan untuk realisasi pajak daerah, pada tahun 2009 sebesar 18.003.313 ribu rupiah.

PAD di Kabupaten Karanganyar di tahun 2009 sebesar 66.604.710 ribu rupiah. Sedangkan untuk realisasi pajak daerah, tahun 2007 sebesar 19.053.559 ribu rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 21.856.746 ribu rupiah.

Prinsip ekonomis, efektif dan efisien juga dapat dilihat melalui besarnya data realisasi anggaran yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2009, Kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 356,84 miliar rupiah atau 51,42 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi belanja sebesar 300,99 miliar rupiah atau mencapai 40,67 persen dari target yang ditetapkan

Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2009 telah berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 369,25 miliar rupiah atau 51,34 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 5,25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan realisasi belanja di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 sebesar 299,27 miliar rupiah atau mencapai 37,42 persen dari target yang ditetapkan.

3 Sehingga dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dalam berbagai unsur penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar.

b. Transparansi

Pada variabel transparansi di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar memiliki nilai signifikan pada f hitung di ² *Levene's test for equality of variance* sebesar 0,673 yang berarti bahwa nilai signifikannya adalah $> (\alpha) 5\%$ atau 0,05 artinya bahwa diantara kedua kabupaten tersebut juga memiliki variance pertanyaan dan jawaban yang sama.

Untuk uji ²¹ beda rata-rata antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, nilai ⁹ *Sig (2-tailed)* pada nilai *t – test for equality of means* pada variabel transparansi menunjukkan nilai sebesar 0,008 yang berarti bahwa nilai signifikannya adalah $< (\alpha) 5\%$ atau 0,05 artinya terdapat perbedaan di dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar khususnya untuk variabel transparansi.

Pada variabel transparansi, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 24,3333 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 22,5781. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo lebih transparan dan terbuka ¹¹ dalam membuat kebijakan-

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat dibanding dengan Kabupaten Karanganyar.

Menurut Tangke, prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan saja namun keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang meliputi 5 (lima) hal yaitu keterbukaan dalam hal rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat.

Keterbukaan yang sudah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo maupun Kabupaten Karanganyar meliputi:

1) Keterbukaan Informasi.

Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai pelelangan untuk pengadaan barang atau jasa di kabupaten, penerimaan pegawai negeri sipil, publikasi APBD kepada masyarakat dan publikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada masyarakat.

2) Keterbukaan prosedur.

Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintahan yang bersifat publik. Misalnya, keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Kabupaten Karanganyar terkait rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan mall atau rencana tata ruang.

3) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Keterbukaan Peran serta ini terjadi bila tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah; adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana; dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutus. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain.

Di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, keterbukaan menerima peran serta masyarakat terlihat pada saat proses musrenbang, baik dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

2. Uji *Independent Sampel Test*

Hasil uji beda dengan menggunakan uji *independent sampel test* yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.
Hasil Pengujian Independen Sampel Test (3 Variabel)

Variabel	Mean		Mann Whitney Test
	Kab. Sukoharjo	Kab Karanganyar	Asymp. Sign
Akuntabilitas	94,87	38,84	0,000
Probity	87,71	46,89	0,000
Pengendalian	84,09	50,96	0,000

Sumber : Data olahan SPSS

a. Akuntabilitas

Hasil uji beda rata-rata dengan menggunakan pengujian *Independent Sample Test* untuk variabel akuntabilitas di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada nilai *Mann Whitney Test* adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikannya adalah $< (\alpha) 5\%$ atau 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar untuk variabel akuntabilitas.

Pada variabel akuntabilitas, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 94,87 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 38,84. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih akuntabel bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam berbagai unsur penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar maka Kabupaten Sukoharjo lebih tepat waktu dalam proses

penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Kabupaten Sukoharjo juga lebih tertib dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan Kabupaten Karanganyar. Selain itu Kabupaten Sukoharjo lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat dibanding Kabupaten Sukoharjo terkait pengelolaan keuangan daerah, hal ini terlihat dengan adanya publikasi APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) kepada masyarakat.

b. Probity

Hasil uji beda rata-rata dengan menggunakan pengujian *Independent Sample Test* untuk variabel *probity* di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada nilai *Mann Whitney Test* adalah sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar untuk variabel *probity*.

Pada variabel *probity*, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 87,71 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 46,89. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, jauh lebih jujur dalam mengelola keuangan publik bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar maka Kabupaten Sukoharjo lebih menegakkan *rule of law* yaitu kerangka hukum yang berlaku dengan adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang diberikan dalam mengelola keuangan di daerah.

c. Pengendalian

Hasil uji beda rata-rata dengan menggunakan pengujian *Independent Sample Test* untuk variabel pengendalian di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada nilai *Mann Whitney Test* adalah sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan

daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar untuk variabel pengendalian.

Pada variabel pengendalian, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 84,09 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih bisa melakukan pengendalian bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam proses APBD.

Hal ini terlihat berdasarkan laporan dari Bank Indonesia tentang Kajian Ekonomi Regional Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2009, dimana Kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 356,84 miliar rupiah atau 51,42 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 14,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2009 berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 369,25 miliar rupiah atau 51,34 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 5,25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Karanganyar, dana perimbangan masih memberi kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,73 persen dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 91,84 persen dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 323,75 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 14,51 persen. Untuk PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing terealisasi sebesar 21,98 miliar rupiah dan 11,11 miliar rupiah. Realisasi PAD mengalami penurunan 0,74 persen sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan 43,54 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan di Kabupaten Karanganyar, Dana perimbangan juga masih memberi kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,26 persen dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 90,61 persen dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 333,27 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 18,98 persen. Untuk PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing terealisasi sebesar 26,75 miliar rupiah dan 9,22 miliar

rupiah. Realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan 33,27 persen dan 69,89 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja pada tahun 2009, Kabupaten Sukoharjo telah merealisasikan belanja sebesar 300,99 miliar rupiah atau mencapai 40,67 persen dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari Belanja Tidak Langsung 245,32 miliar rupiah dan Belanja Langsung 55,68 miliar rupiah yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,87 persen dan 11,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam Belanja Tidak Langsung terdapat peningkatan Belanja Pegawai 51,84 persen atau terealisasi sebesar 233,10 miliar rupiah. Sedangkan pada pos Belanja Langsung pada komponen barang dan jasa terealisasi sebesar 30,65 miliar rupiah, mengalami penurunan 4,19 persen sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah meningkat 92,11 persen.

Sedangkan pada Kabupaten Karanganyar pada tahun yang sama (2009) telah merealisasikan belanja sebesar 299,27 miliar rupiah atau mencapai 37,42 persen dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari Belanja Tidak Langsung 275,51 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,88 persen dan Belanja Langsung 27,88 miliar rupiah atau turun sebesar 15,10 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam Belanja Tidak Langsung terdapat peningkatan Belanja Pegawai 12,36 persen atau terealisasi sebesar 247,26 miliar rupiah. Sedangkan pada pos Belanja Langsung pada komponen barang dan jasa terealisasi sebesar 18,44 miliar rupiah, mengalami peningkatan 1,29 persen sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 5,32 miliar rupiah menurun 22,97 persen.

Berdasarkan data-data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo lebih bisa melakukan pengendalian bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam proses APBD.

Dari substansi kuesioner dan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa diantara kedua kabupaten yang diteliti yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam

kebijakan tata kelola keuangan di daerah masing-masing, dan terdapat perbedaan dalam penerapan (implementasi) seluruh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah baik di Kabupaten Sukoharjo maupun di Kabupaten Karanganyar. Perbedaan penerapan (implementasi) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil atau capaian output pada pelaksanaan kebijakan tata kelola keuangan di Kabupaten Sukoharjo maupun di Kabupaten Karanganyar. Sehingga H1 diterima.

33

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam penerapan seluruh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah antara Kabupaten Sukoharjo dengan Karanganyar. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan kedua daerah tersebut adalah: akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian. Perbedaan tersebut jelas akan mengakibatkan cara penerapan kebijakan yang berbeda di tiap kabupaten sehingga tidak akan dapat dicapai target yang ideal khususnya dalam perumusan maupun penetapan kebijakan tata kelola keuangan daerah.
2. Masing-masing variabel yaitu akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian, diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo lebih baik dari dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah pada Kabupaten Karanganyar. Hal ini terlihat dari nilai mean (rata-rata) hasil uji beda statistik yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows 13.0*.
3. Dari kelima prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian, diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo masih lemah dalam pelaksanaan prinsip *value for money*, dan transparansi dengan nilai mean 34,3889 dan 24,3333. Sedangkan pada prinsip yang lain yaitu akuntabilitas, *probity*, dan pengendalian telah dilaksanakan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan nilai mean masing-masing 94,87 ; 87,71 dan 84,09.

4. Pada Kabupaten Karanganyar pelaksanaan kelima prinsip pengelolaan keuangan daerah masih lemah karena nilai mean dari setiap variabel masih dibawah 80 persen dengan nilai mean masing-masing variabel berturut-turut adalah sebagai berikut: akuntabilitas (38,84), *value for money* (32,0938), *probity* (46,89), transparansi (22,5781) dan pengendalian (50,96)
5. Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu :
- Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah survey melalui kuisisioner. Masalah yang mungkin timbul adalah rendahnya respon rate dan terjadinya bias oleh responden dalam pengisian kuisisioner karena tidak adanya pengendalian dari peneliti.
 - Banyaknya kuisisioner yang tidak kembali karena rentang waktu pengisian yang dianggap kurang atau hilang.

32

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo., 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi ,Yogyakarta

31

Sugiyono., 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Yuwono, S., et al. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Bayumedia Publishing. Malang.

18

Kumorotomo W, 2008, *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

USAID – LGSP, 2009, *Kajian Akademis Reformasi Organisasi Keuangan Daerah*. Seri Manajemen Pelayanan Publik.

Halim, A. Theresia Damayanti, ⁵⁸ 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIE YKPN. Yogyakarta.

Todung, 2009. *Indeks Persepsi Korupsi*

Nayra, 2008, ³⁰ *Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. <http://gunungmakalahbogspot.com>

SOLOPOS, 12 Agustus 2012

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.yumpu.com Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
4	adoc.tips Internet Source	1%
5	fr.scribd.com Internet Source	1%
6	dokumen.tips Internet Source	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	anapangesti.blogspot.com Internet Source	1%
9	Ahmad Danu Syaputra, Fitria Fitria, Dheo	

Rimbano. "Perbandingan Model Pembelajaran Mata Kuliah Metodologi Penelitian Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019

Publication

1%

10

liputan8.com

Internet Source

1%

11

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

<1%

12

repository.uksw.edu

Internet Source

<1%

13

mpl-alfbs2004347.blogspot.com

Internet Source

<1%

14

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1%

15

karyasantai.blogspot.com

Internet Source

<1%

16

testblogsoetirman.blogspot.com

Internet Source

<1%

17

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

18

docobook.com

Internet Source

<1%

19	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
20	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
21	core.ac.uk Internet Source	<1%
22	Tri Wulanjayanti, Darman Usman. "THE EFFECT OF SERVICE QUALITY OF ELECTRONIC TAXING SYSTEM AND TAX EMPLOYEE COMPETENCE ON TAXPAYER SATISFACTION", Jurnal Akuntansi, 2019 Publication	<1%
23	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
24	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
25	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
26	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1%
27	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
28	candymiint.blogspot.com Internet Source	<1%

29	repository.uii.ac.id Internet Source	<1%
30	refrensi-skripsi.blogspot.com Internet Source	<1%
31	semirata2016.fp.unimal.ac.id Internet Source	<1%
32	repo.polinpdg.ac.id Internet Source	<1%
33	faperta.uho.ac.id Internet Source	<1%
34	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1%
35	Desy Sukma Risalahwati, Makrina Tindangen, Sukartiningsih Sukartiningsih. "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model PQ4R Media Concept Mapping Terhadap Hasil Belajar Biologi", BIODIK, 2020 Publication	<1%
36	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
37	isa7695.wordpress.com Internet Source	<1%
38	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1%

39	artikelku99.blogspot.com Internet Source	<1%
40	dental-press.ru Internet Source	<1%
41	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
42	www.bi.go.id Internet Source	<1%
43	Submitted to IAI KAPD Jawa Timur Student Paper	<1%
44	library.binus.ac.id Internet Source	<1%
45	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
46	www.lintasgayo.com Internet Source	<1%
47	www.bca.co.id Internet Source	<1%
48	www.neliti.com Internet Source	<1%
49	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1%
50	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

<1%

51

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

52

de.scribd.com

Internet Source

<1%

53

bintankab.go.id

Internet Source

<1%

54

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1%

55

Aga Arye Perdana. JURNAL EKONOMI SAKTI (JES), 2019

Publication

<1%

56

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1%

57

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1%

58

Submitted to Southeast Community College

Student Paper

<1%

59

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1%

60

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On